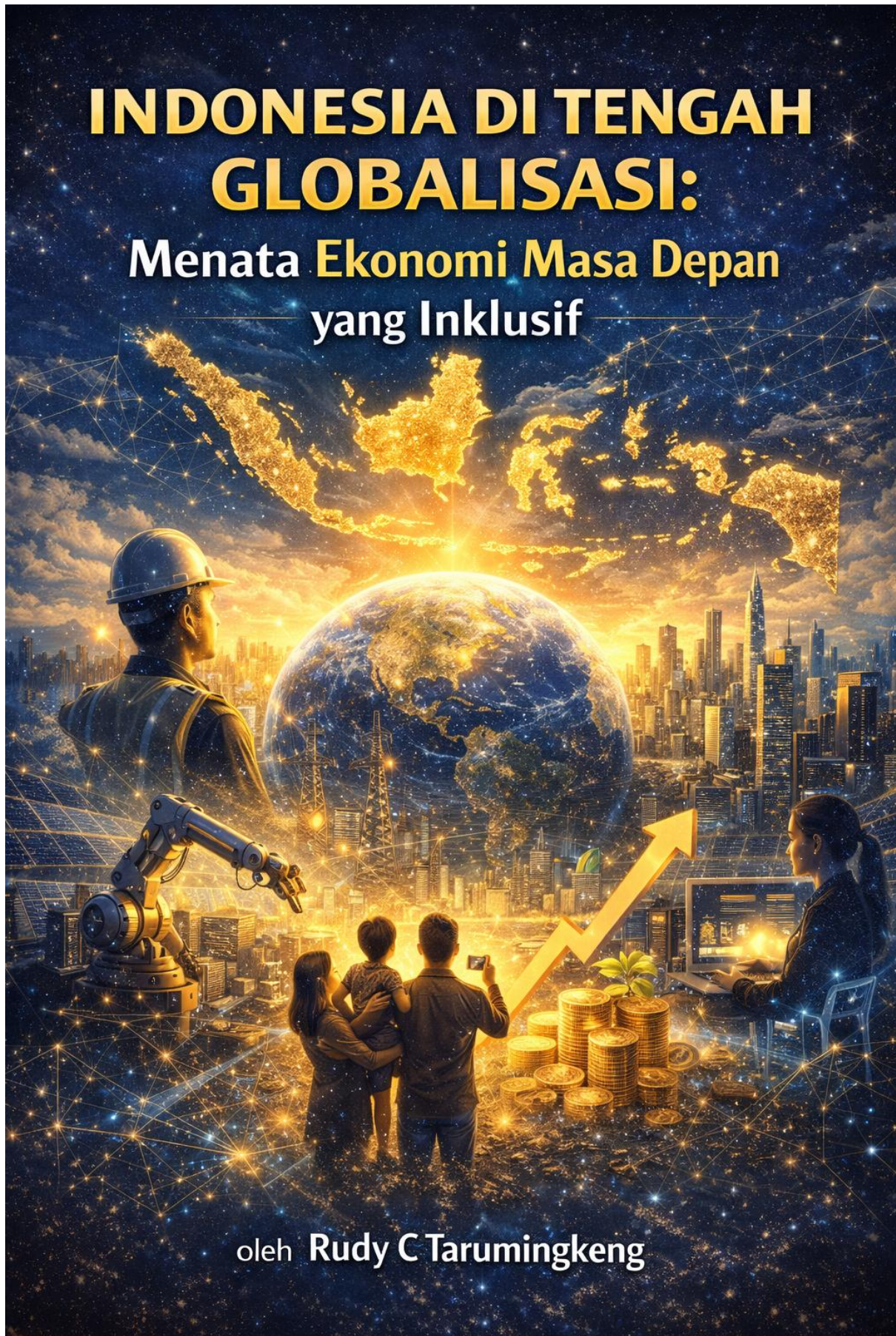


INDONESIA DI TENGAH GLOBALISASI:

Menata **Ekonomi Masa Depan**
yang Inklusif



oleh **Rudy C Tarumingkeng**

*Rudy C Tarumingkeng: Indonesia di Tengah Globalisasi - Menata
Ekonomi Masa Depan yang Inklusif*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

3 April 2026

INDONESIA DI TENGAH GLOBALISASI: MENATA EKONOMI MASA DEPAN YANG INKLUSIF

Abstrak

Globalisasi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai perluasan perdagangan bebas, mobilitas modal, dan integrasi pasar internasional. Dalam dekade mutakhir, globalisasi bergerak dalam lanskap yang lebih kompleks: pertumbuhan dunia cenderung moderat, ketegangan dagang meningkat, digitalisasi ekonomi meluas, dan negara-negara berlomba membangun daya tahan industri, pangan, energi, dan teknologi. IMF memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,3 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027, sedangkan WTO memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia melambat menjadi 1,9 persen pada 2026, sementara perdagangan jasa komersial tetap tumbuh lebih kuat, sekitar 4,8 persen. Dalam konteks semacam ini, posisi Indonesia tidak dapat lagi ditentukan hanya oleh kemampuan mengekspor komoditas atau menjaga stabilitas makro, tetapi juga oleh kemampuannya membangun produktivitas, memperluas kualitas pekerjaan, memperdalam transformasi digital, serta memastikan bahwa manfaat integrasi global tidak hanya dinikmati oleh kelompok dan wilayah tertentu. ([IMF](#))

Secara makro, Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, lebih

tinggi dibanding 5,03 persen pada 2024; ekspor barang dan jasa menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen. Neraca perdagangan Januari–Desember 2025 juga membukukan surplus US\$41,05 miliar, sementara inflasi 2025 tetap berada dalam sasaran Bank Indonesia, dengan inflasi tahunan Desember 2025 sebesar 2,92 persen. Akan tetapi, ketahanan makro ini belum otomatis berarti bahwa struktur ekonomi Indonesia telah cukup inklusif. BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 8,57 persen, tetapi gini ratio pada periode yang sama berada di 0,381. Di sisi lain, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 sebesar 4,76 persen, namun proporsi pekerja informal justru naik menjadi 59,40 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata bagaimana bertahan di tengah globalisasi, melainkan bagaimana mengubah globalisasi menjadi mesin penciptaan kesempatan yang lebih adil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berargumen bahwa ekonomi masa depan Indonesia yang inklusif harus dibangun di atas lima pilar utama: transformasi produktivitas dan penciptaan pekerjaan bermutu; pendalaman industri dan jasa bernilai tambah; digitalisasi yang memperluas akses, bukan memperlebar kesenjangan; transisi hijau yang membuka peluang baru lintas wilayah; dan tata kelola negara yang lebih prediktif, kompetitif, serta berorientasi pada pemerataan kesempatan. World Bank menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai status upper-middle-income pada 2023, tetapi untuk mencapai negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural, membangun lingkungan usaha yang lebih kompetitif, dan memperbesar penciptaan pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, tema utama makalah ini adalah bahwa masa depan ekonomi Indonesia di tengah globalisasi tidak cukup ditata dengan logika pertumbuhan agregat, tetapi harus diarahkan pada perluasan kapabilitas rakyat, mobilitas sosial, dan distribusi kesempatan produktif antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok sosial. ([The World Bank Documents](#))

Kata Kunci

Indonesia, globalisasi, ekonomi inklusif, produktivitas, pekerjaan bermutu, digitalisasi, hilirisasi, transformasi hijau, ketimpangan, pembangunan berkelanjutan

Indonesia di Tengah Globalisasi: Menata Ekonomi Masa Depan yang Inklusif

1. Pendahuluan

Globalisasi selama ini sering dipahami dalam arti yang terlalu sempit, seolah-olah ia hanya menyangkut perdagangan internasional, masuknya investasi asing, dan keterbukaan pasar. Padahal, globalisasi modern telah berubah menjadi proses yang jauh lebih dalam: ia membentuk ulang rantai pasok, teknologi, pasar tenaga kerja, arsitektur keuangan, standar produksi, dan bahkan cara negara merumuskan strategi pembangunan. Latar global saat ini memperlihatkan paradoks. Di satu pihak, ekonomi dunia tetap tumbuh dan layanan lintas batas, terutama jasa, semakin penting. Di pihak lain, dunia juga menghadapi tekanan geopolitik, ketidakpastian dagang, dan kebutuhan adaptasi terhadap teknologi baru. IMF memperkirakan pertumbuhan global tetap berada pada 3,3 persen pada 2026, sementara WTO menunjukkan perdagangan barang dunia cenderung melambat dibanding perdagangan jasa. Ini berarti keterbukaan tetap relevan, tetapi bentuk keterbukaan yang menguntungkan sedang berubah. ([IMF](#))

Bagi Indonesia, perubahan global tersebut menghadirkan peluang sekaligus ujian. Secara statistik, posisi Indonesia tampak cukup menjanjikan. Pada 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen, ekspor barang dan jasa meningkat, dan neraca perdagangan tetap surplus. Bank Indonesia juga mencatat ketahanan sektor eksternal yang kuat, dengan

neraca pembayaran 2024 tetap surplus dan cadangan devisa akhir 2024 mencapai US\$155,7 miliar, setara 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dengan jumlah penduduk pertengahan 2025 sekitar 284,4 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar, sekaligus basis tenaga kerja dan konsumsi yang dapat menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun demikian, pembangunan yang hanya dibaca dari pertumbuhan PDB menyimpan keterbatasan serius. World Bank mencatat bahwa meskipun pertumbuhan berkelanjutan telah mengangkat 12 juta orang keluar dari kemiskinan sejak 2000 dan mengantarkan Indonesia ke status upper-middle-income pada 2023, banyak pekerjaan di Indonesia masih terkonsentrasi pada jasa informal berproduktivitas rendah. Hambatan persaingan, distorsi kebijakan, dan lemahnya penciptaan pekerjaan berkualitas di manufaktur serta jasa bernilai tambah tinggi telah menghambat produktivitas, pertumbuhan upah riil, dan mobilitas sosial kelas menengah. Dengan kata lain, masalah utama Indonesia bukan absennya pertumbuhan, melainkan kualitas struktur pertumbuhan itu sendiri. ([The World Bank Documents](#))

Di titik inilah tema ekonomi masa depan yang inklusif menjadi sangat penting. Inklusif berarti lebih dari sekadar menurunkan angka kemiskinan. Inklusif berarti memastikan bahwa pertumbuhan menghasilkan pekerjaan bermutu, memperluas akses terhadap pendidikan, teknologi, keuangan, dan pasar, sekaligus mengurangi ketimpangan peluang antarkelompok dan antarwilayah. BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2024 turun menjadi 8,57 persen, tetapi gini ratio tercatat 0,381; pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen, namun pekerja informal naik ke 59,40 persen. Data ini menegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan "pertumbuhan dengan dualisme": ekonomi bertumbuh, tetapi sebagian besar angkatan kerja masih berada dalam lapisan produktivitas rendah dan perlindungan yang terbatas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, makalah ini berangkat dari tesis bahwa Indonesia perlu menata ulang posisinya di tengah globalisasi. Pertanyaan pokoknya bukan lagi apakah Indonesia harus terbuka atau tertutup, melainkan bagaimana keterbukaan itu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah domestik, pekerjaan yang lebih baik, pemerataan wilayah, dan kapabilitas manusia yang lebih kuat. Dengan dasar tersebut, pembahasan akan diarahkan pada analisis posisi Indonesia saat ini, tantangan utama yang menghambat inklusivitas, serta strategi penataan ekonomi masa depan yang lebih adil dan berdaya saing.

2. Globalisasi dan Inklusivitas: Kerangka Konseptual

Dalam literatur pembangunan, globalisasi sering dipuji karena memperluas akses pasar, mendorong transfer teknologi, dan memacu efisiensi. Akan tetapi, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa manfaat globalisasi tidak tersebar secara otomatis. Negara yang memiliki kapasitas institusional, infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, dan strategi industri yang jelas cenderung memperoleh keuntungan lebih besar. Sebaliknya, negara yang hanya membuka pasar tanpa memperkuat basis domestik berisiko menjadi konsumen, pemasok bahan mentah, atau lokasi tenaga kerja murah tanpa peningkatan kapabilitas jangka panjang. Karena itu, globalisasi bukan kekuatan netral; ia selalu berinteraksi dengan kualitas kebijakan domestik.

Konsep inklusivitas menjadi penting justru karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kemajuan sosial yang merata. Dalam konteks Indonesia, World Bank menekankan bahwa pencapaian status negara berpendapatan tinggi pada 2045 menuntut pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi juga memerlukan lingkungan usaha yang lebih kompetitif, mobilisasi modal swasta ke aktivitas produktif yang kaya lapangan kerja, reformasi perizinan, liberalisasi investasi, perbaikan perdagangan dan logistik, penguatan jasa digital, serta pendalaman sektor keuangan. Rumusan ini menyiratkan bahwa ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang tidak

hanya membesar secara agregat, tetapi juga memperluas kapasitas produktif masyarakat luas. ([The World Bank Documents](#))

Dengan demikian, inklusivitas dapat dipahami melalui sedikitnya empat dimensi. Pertama, dimensi distribusi, yaitu apakah pertumbuhan menurunkan kemiskinan dan mencegah ketimpangan membesar. Kedua, dimensi kesempatan, yakni apakah rakyat memiliki akses yang lebih luas pada pendidikan, kesehatan, teknologi, dan keuangan. Ketiga, dimensi produktivitas, yaitu apakah pekerjaan yang tercipta semakin formal, bermutu, dan berupa lebih baik. Keempat, dimensi spasial, yakni apakah pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat ekonomi tertentu. Kerangka ini penting karena banyak negara tampak berhasil di permukaan, tetapi sebenarnya mengalami konsentrasi manfaat globalisasi pada sektor, kota, dan kelompok tertentu saja.

Dari perspektif ini, ekonomi masa depan Indonesia yang inklusif harus dipahami sebagai proyek transformasi struktural. Artinya, Indonesia tidak cukup hanya menambah volume perdagangan, memperbesar investasi, atau membangun infrastruktur fisik. Indonesia perlu mengubah komposisi ekonominya dari dominasi aktivitas berproduktivitas rendah menuju basis produksi dan jasa yang lebih kompleks, lebih digital, lebih hijau, dan lebih padat pengetahuan. Inklusif dalam konteks tersebut berarti pertumbuhan produktivitas harus berjalan bersama pelebaran akses sosial.

3. Posisi Indonesia di Tengah Globalisasi Kontemporer

Secara umum, Indonesia memasuki pertengahan dekade 2020-an dengan fondasi makro yang relatif stabil. IMF dalam konsultasi Pasal IV 2025 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah guncangan eksternal, inflasi berada dalam kisaran sasaran, dan sektor keuangan secara umum cukup resilien. BPS pun mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, dengan ekspor barang dan jasa menjadi komponen pengeluaran yang tumbuh paling tinggi. Neraca perdagangan 2025 juga tetap surplus US\$41,05 miliar, yang menunjukkan

bahwa Indonesia masih mendapat dukungan dari sisi eksternal, terutama pada sektor nonmigas. ([IMF](#))

Kinerja eksternal tersebut penting karena menunjukkan bahwa Indonesia belum tersingkir dari arus ekonomi global. Bank Indonesia melaporkan bahwa transaksi modal dan finansial 2024 mencatat surplus US\$16,4 miliar, naik dari US\$9,9 miliar pada 2023, sementara cadangan devisa akhir 2024 meningkat menjadi US\$155,7 miliar. Bank Indonesia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2025 tetap sehat, berada pada kisaran 0,5–1,3 persen dari PDB. Ini memberi sinyal bahwa keterbukaan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh persepsi investor yang cukup positif dan posisi eksternal yang relatif terkendali. ([Bank Indonesia](#))

Akan tetapi, posisi yang relatif stabil ini tidak boleh dibaca secara berlebihan. Laporan Macro Poverty Outlook World Bank menilai bahwa meskipun pertumbuhan Indonesia cukup tangguh, penciptaan pekerjaan berkualitas masih terbatas dan tekanan sosial dapat muncul bila pertumbuhan tidak menghasilkan peluang yang lebih inklusif. Pada paruh pertama 2025, pertumbuhan memang ditopang konsumsi swasta dan investasi, tetapi manufaktur tradable tumbuh lebih lambat dibanding sejumlah jasa. World Bank juga memperingatkan bahwa konsumsi riil kelas menengah tertinggal dibanding kelompok termiskin dan terkaya, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang mobilitas sosial. Artinya, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar bertahan dalam globalisasi, melainkan naik kelas di dalamnya. ([The World Bank Documents](#))

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari pasar domestik dan transformasi digital. BPS melaporkan bahwa 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, naik dari 69,21 persen pada 2023. OJK dan BPS juga melaporkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia naik menjadi 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan menjadi 80,51 persen dalam SNLIK 2025. Bank Indonesia menilai fondasi ekonomi digital Indonesia semakin kuat; pada triwulan III 2025,

volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi, dan BI memprakirakan volume transaksi digital bisa mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030. Ini menandakan bahwa globalisasi Indonesia tidak lagi hanya berlangsung melalui pelabuhan, bandara, dan pabrik, tetapi juga melalui jaringan digital, pembayaran elektronik, dan pertukaran data. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada saat yang sama, Indonesia juga mendorong transformasi industri melalui hilirisasi dan agenda energi. Kementerian Investasi/Hilirisasi melaporkan bahwa realisasi investasi bidang hilirisasi pada Januari–Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen secara tahunan. Di sektor energi, Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru terbarukan pada 2025 mencapai 15,75 persen, sementara RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan pembangkit 69,5 GW dengan 76 persen kapasitas tambahan berasal dari EBT dan storage. Arah ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai menanggapi globalisasi baru—yang semakin ditandai oleh digitalisasi, industrial policy, dan transisi hijau—dengan langkah-langkah strategis. Namun, keberhasilan akhir dari langkah ini sangat tergantung pada apakah transformasi tersebut juga menghasilkan inklusivitas sosial dan spasial. ([BKPM](#))

4. Tantangan Utama: Mengapa Pertumbuhan Belum Cukup Inklusif?

Tantangan pertama adalah kualitas pekerjaan. BPS menunjukkan bahwa pada Februari 2025 penduduk bekerja mencapai 145,77 juta orang dan pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen. Namun pada saat yang sama, proporsi pekerja informal justru meningkat menjadi 59,40 persen. World Bank menegaskan bahwa pekerjaan di Indonesia masih banyak terkonsentrasi pada jasa informal berproduktivitas rendah, sementara manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi belum mampu menghasilkan cukup banyak pekerjaan berkualitas. Inilah jantung persoalan inklusivitas Indonesia: lapangan kerja memang tersedia, tetapi terlalu banyak di antaranya belum memberikan keamanan pendapatan, perlindungan sosial,

atau jalur peningkatan keterampilan yang memadai. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan kedua adalah ketimpangan dan mobilitas sosial. BPS mencatat gini ratio September 2024 sebesar 0,381; di wilayah perkotaan angkanya lebih tinggi, yakni 0,402. Walaupun kemiskinan turun menjadi 8,57 persen atau 24,06 juta orang, World Bank menunjukkan bahwa konsumsi riil kelas menengah tertinggal dibanding kelompok termiskin dan terkaya. Ini memberi sinyal bahwa pertumbuhan tidak secara otomatis memperkuat lapisan tengah masyarakat, padahal kelas menengah adalah fondasi penting bagi ekonomi modern yang inovatif, berdaya beli stabil, dan tahan guncangan. Bila kelas menengah melemah atau stagnan, maka inklusivitas pertumbuhan akan rapuh secara politik maupun ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan ketiga adalah kualitas sumber daya manusia. BPS melaporkan IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, naik dari 74,39 pada 2023. Ini merupakan kemajuan yang nyata. Akan tetapi, data yang sama juga memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas baru 8,85 tahun pada 2024, sehingga kualitas modal manusia Indonesia masih membutuhkan percepatan. Dalam konteks globalisasi yang semakin berbasis data, otomasi, dan jasa canggih, keterbatasan keterampilan dapat menjadi penghambat utama mobilitas sosial dan produktivitas. Pekerjaan baru yang tercipta dalam jasa digital, manufaktur modern, logistik cerdas, dan ekonomi hijau menuntut kemampuan yang jauh lebih kompleks dibanding pola kerja lama. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan keempat adalah kesenjangan akses digital dan keuangan yang masih tersisa. Meskipun 72,78 persen penduduk telah mengakses internet, berarti masih ada lebih dari seperempat penduduk yang belum menikmati konektivitas digital. Di sektor keuangan, SNLIK 2025 menunjukkan bahwa kelompok berpendidikan rendah, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan

kelompok yang tidak atau belum bekerja memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibanding kelompok berpendidikan tinggi dan profesional. Ini berarti digitalisasi dan keuangan formal memang berkembang, tetapi belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang justru paling membutuhkan perluasan kesempatan ekonomi. Jika tidak diatasi, ekonomi masa depan bisa menjadi lebih modern sekaligus lebih eksklusif.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan kelima adalah struktur nilai tambah. Surplus perdagangan Indonesia masih banyak ditopang sektor nonmigas dan komoditas, sementara World Bank mencatat perlunya reformasi lebih dalam di bidang persaingan, logistik, jasa digital, dan iklim investasi agar manufaktur dan jasa bernilai tinggi benar-benar menjadi mesin penciptaan pekerjaan baik. Dengan kata lain, Indonesia belum selesai dengan agenda transformasi struktural. Hilirisasi memang menjanjikan, tetapi hilirisasi yang inklusif harus melampaui ekspor bahan antara; ia harus menciptakan keterkaitan domestik, transfer teknologi, kluster industri, dan peluang kerja yang naik kelas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5. Menata Ekonomi Masa Depan yang Inklusif

5.1. Dari Pertumbuhan ke Produktivitas dan Good Jobs

Pilar pertama dari ekonomi masa depan yang inklusif adalah pergeseran fokus dari sekadar pertumbuhan menuju produktivitas dan kualitas pekerjaan. Selama lapangan kerja Indonesia didominasi sektor informal berproduktivitas rendah, maka pertumbuhan akan cenderung rapuh dan sulit menghasilkan kenaikan upah riil yang luas. Karena itu, agenda pembangunan harus diarahkan pada penciptaan pekerjaan formal, peningkatan keterampilan, perlindungan sosial yang lebih luas, dan insentif bagi usaha agar naik kelas. World Bank secara eksplisit menyebut bahwa perluasan pekerjaan yang lebih baik memerlukan reformasi struktural, lingkungan usaha yang lebih kompetitif, dan mobilisasi modal swasta ke sektor produktif yang job-rich. ([The World Bank Documents](#))

Dalam praktiknya, ini berarti kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup berhenti pada penurunan TPT. Ukuran keberhasilan yang lebih tepat adalah apakah penduduk bekerja memperoleh penghasilan yang layak, status kerja yang lebih aman, serta akses terhadap jaminan sosial dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan rata-rata upah buruh Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta per bulan, ruang untuk peningkatan pendapatan masih sangat besar, terutama bila dikaitkan dengan biaya hidup perkotaan dan aspirasi naik kelas. Di sini, produktivitas perusahaan, kualitas manajemen, teknologi, dan pelatihan menjadi faktor yang tak terpisahkan dari agenda inklusivitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5.2. Memperdalam Industri dan Jasa Bernilai Tambah

Pilar kedua adalah pendalaman struktur ekonomi. Indonesia membutuhkan industrialisasi generasi baru yang tidak hanya mengekspor bahan mentah atau setengah jadi, tetapi memperbesar pengolahan domestik, manufaktur canggih, dan jasa modern. Hilirisasi 2025 yang tumbuh kuat dapat menjadi pintu masuk, tetapi hilirisasi harus dirancang sebagai strategi pembelajaran nasional, bukan hanya strategi ekstraksi rente sesaat. Demikian pula, World Bank menilai jasa bernilai tinggi dan jasa ekspor memiliki potensi besar bagi pertumbuhan Indonesia dalam RPJMN 2025–2029. Ini penting, sebab ekonomi modern tidak dibangun semata-mata oleh pabrik, melainkan juga oleh logistik, desain, data, layanan profesional, pendidikan, kesehatan, dan ekosistem inovasi. ([BKPM](#))

Bila strategi ini berhasil, maka globalisasi tidak lagi dilihat sebagai ancaman bagi pasar domestik, tetapi sebagai ruang untuk menaikkan posisi Indonesia dalam rantai nilai. Indonesia dapat bergerak dari sekadar eksportir komoditas menjadi produsen barang antara, barang jadi, dan layanan berbasis pengetahuan. Namun langkah itu mensyaratkan kepastian regulasi, kualitas pelabuhan dan logistik, insentif investasi yang konsisten, serta hubungan lebih erat antara pendidikan, riset, dan industri.

5.3. Digitalisasi yang Meratakan Peluang

Pilar ketiga ialah digitalisasi yang bersifat inklusif. Pertumbuhan akses internet, pembayaran digital, dan inklusi keuangan membuka kesempatan besar bagi UMKM, pekerja mandiri, pelajar, dan masyarakat di luar pusat kota. Tetapi manfaat ini tidak muncul otomatis. Akses digital perlu disertai literasi digital, literasi keuangan, perlindungan konsumen, interoperabilitas pembayaran, dan biaya akses yang terjangkau. Data OJK menunjukkan adanya kesenjangan literasi dan inklusi keuangan menurut tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan; artinya, modernisasi keuangan harus dibarengi strategi pemberdayaan. ([OJK Portal](#))

Dari perspektif kebijakan, digitalisasi inklusif berarti menghubungkan teknologi dengan produktivitas rakyat kecil. Pasar digital, pembayaran elektronik, pembiayaan digital, dan logistik berbasis data harus menjadi sarana agar usaha mikro dan kecil dapat memperluas pasar, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan pencatatan usahanya. Jika digitalisasi hanya menguntungkan platform besar tanpa memperkuat kemampuan produsen kecil, maka ia akan memperlebar konsentrasi ekonomi. Karena itu, infrastruktur digital harus dipadukan dengan penguatan kapasitas manusia.

5.4. Transisi Hijau sebagai Agenda Keadilan Wilayah

Pilar keempat adalah ekonomi hijau. Globalisasi masa depan makin dibentuk oleh standar lingkungan, transisi energi, dan tekanan dekarbonisasi. Indonesia memiliki alasan kuat untuk melihat transisi hijau bukan sekadar kewajiban, tetapi peluang pembangunan. Data ESDM menunjukkan bauran EBT 2025 mencapai 15,75 persen, sementara RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas besar dengan dominasi EBT dan storage. Bila dikelola dengan benar, transisi energi dapat menciptakan investasi baru, industri peralatan, lapangan kerja regional, dan perbaikan kualitas hidup. ([Kementerian ESDM RI](#))

Namun transisi hijau juga harus inklusif. Daerah penghasil sumber daya, wilayah kepulauan, dan komunitas yang selama ini tertinggal tidak boleh

hanya menjadi lokasi proyek tanpa memperoleh manfaat pembelajaran, pekerjaan, dan infrastruktur. Ekonomi hijau yang inklusif berarti energi bersih dipakai untuk mendorong produktivitas lokal, mendukung UMKM, mengurangi biaya logistik, dan memperluas kualitas layanan dasar. Dalam kerangka itu, transisi hijau seharusnya menjadi jembatan antara agenda daya saing dan agenda keadilan wilayah.

5.5. Tata Kelola, Standar, dan Negara yang Memampukan

Pilar kelima adalah reformasi tata kelola. Tidak ada ekonomi inklusif tanpa negara yang mampu menciptakan aturan yang konsisten, administrasi yang efisien, dan iklim usaha yang dapat diprediksi. IMF menekankan perlunya bauran kebijakan yang hati-hati serta reformasi struktural yang berani dan sehat untuk memastikan pertumbuhan yang tahan lama dan berkualitas tinggi. World Bank menambahkan bahwa reformasi perizinan, perdagangan, logistik, jasa digital, dan pendalaman keuangan merupakan elemen penting untuk meningkatkan potensi pertumbuhan. Artinya, peran negara bukan digantikan oleh globalisasi, tetapi justru semakin penting untuk memastikan bahwa keterbukaan ekonomi bekerja bagi kepentingan nasional dan kepentingan publik. ([IMF](#))

Dalam konteks ini, Indonesia perlu membangun negara yang lebih “memampukan” daripada sekadar “mengatur”. Negara perlu memfasilitasi standarisasi, pembiayaan, pendidikan vokasi, kemitraan industri, dukungan UMKM, dan inovasi daerah. Negara juga harus mampu menghubungkan strategi makro dengan kebutuhan mikro: antara neraca perdagangan dan upah pekerja, antara investasi besar dan kapasitas pemasok lokal, antara digitalisasi nasional dan akses warga desa.

6. Agenda Strategis Indonesia ke Depan

Dari seluruh pembahasan di atas, terdapat beberapa agenda strategis yang layak ditekankan. Pertama, Indonesia perlu menjadikan penciptaan good jobs sebagai sasaran sentral kebijakan ekonomi. Ini berarti keberhasilan

ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan PDB, investasi, atau ekspor, tetapi juga dari peningkatan formalitas kerja, produktivitas tenaga kerja, cakupan jaminan sosial, dan upah riil.

Kedua, Indonesia perlu menghubungkan hilirisasi dengan agenda pembelajaran nasional. Nilai tambah domestik harus diperluas melalui riset, rekayasa, pelatihan teknis, dan penguatan jaringan pemasok lokal. Tanpa itu, hilirisasi berisiko hanya memperpanjang umur ekonomi ekstraktif dalam bentuk baru.

Ketiga, Indonesia harus memperluas konektivitas digital dan inklusi keuangan ke kelompok yang tertinggal. Kesenjangan pendidikan, wilayah, dan pekerjaan dalam akses keuangan dan digital harus dipersempit agar ekonomi digital benar-benar menjadi alat demokratisasi kesempatan.

Keempat, transformasi hijau harus diposisikan sebagai strategi pembangunan inklusif. Energi bersih, efisiensi, dan infrastruktur rendah karbon perlu diarahkan bukan hanya untuk memenuhi target, tetapi untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru di luar wilayah inti.

Kelima, reformasi kelembagaan harus memperkuat prediktabilitas kebijakan. Investor, pekerja, UMKM, dan pemerintah daerah membutuhkan kepastian. Tanpa kepastian, globalisasi akan menghasilkan spekulasi jangka pendek; dengan kepastian, globalisasi bisa menjadi mesin pembangunan jangka panjang.

7. Kesimpulan

Indonesia berada pada posisi yang unik di tengah globalisasi kontemporer. Di satu sisi, negara ini memiliki fondasi makro yang cukup tangguh: pertumbuhan 5,11 persen pada 2025, inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang besar, pasar domestik luas, serta arus digitalisasi dan investasi yang terus berkembang. Di sisi lain, kualitas pertumbuhan masih menghadapi persoalan mendasar: tingginya informalitas, keterbatasan penciptaan pekerjaan bermutu, ketimpangan yang belum sepenuhnya

terselesaikan, serta akses yang belum merata terhadap peluang digital, finansial, dan teknologi. Dengan kata lain, Indonesia telah cukup berhasil bertahan di tengah globalisasi, tetapi belum sepenuhnya berhasil menata globalisasi agar bekerja secara inklusif bagi seluruh rakyat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia yang inklusif harus dibangun melalui transformasi struktural yang sadar arah. Indonesia perlu memindahkan pusat gravitasi pembangunan dari pertumbuhan kuantitatif menuju pertumbuhan produktif, dari pekerjaan yang banyak menuju pekerjaan yang baik, dari keterbukaan yang pasif menuju keterbukaan yang strategis, dan dari modernisasi yang terkonsentrasi menuju modernisasi yang merata. Reformasi iklim usaha, pendalaman industri dan jasa, digitalisasi yang meratakan peluang, transisi hijau yang adil, serta penguatan kualitas sumber daya manusia harus dipahami sebagai satu paket, bukan agenda yang terpisah-pisah. ([The World Bank Documents](#))

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bagi Indonesia bukanlah apakah globalisasi akan terus berlangsung, sebab globalisasi dalam bentuk baru hampir pasti akan terus membentuk ekonomi dunia. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia akan sekadar ikut di dalam arus itu, atau mampu menjadi negara yang menata arus itu untuk memperbesar kesejahteraan, mobilitas sosial, dan martabat ekonominya sendiri. Ekonomi masa depan yang inklusif hanya akan tercapai bila pertumbuhan, teknologi, investasi, dan keterbukaan internasional benar-benar diterjemahkan menjadi kemampuan rakyat untuk belajar, bekerja, berusaha, dan hidup lebih baik secara merata.

Glosarium

Ekonomi inklusif

Pola pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan, akses, dan manfaat pembangunan bagi kelompok sosial dan wilayah yang lebih luas.

Formalitas kerja

Keadaan ketika pekerja berada dalam hubungan kerja atau usaha yang lebih teratur, memiliki perlindungan hukum, dan umumnya lebih dekat dengan jaminan sosial serta kepastian pendapatan.

Globalisasi

Proses integrasi antarnegara melalui perdagangan, investasi, teknologi, keuangan, data, mobilitas manusia, serta standar dan institusi internasional.

Good jobs

Pekerjaan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga produktif, memberikan pendapatan layak, peluang belajar, perlindungan dasar, dan jalur mobilitas ekonomi.

Hilirisasi

Proses peningkatan nilai tambah domestik melalui pengolahan bahan mentah atau komoditas menjadi produk antara, produk jadi, atau basis industri lanjutan.

Informalitas

Keadaan ketika aktivitas kerja atau usaha berlangsung di luar struktur formal yang stabil, sering kali ditandai pendapatan tidak pasti, perlindungan sosial rendah, dan produktivitas lebih kecil.

Inklusi keuangan

Kondisi ketika masyarakat memiliki akses yang memadai, terjangkau, dan bermanfaat terhadap layanan keuangan formal.

Ketimpangan

Perbedaan distribusi pendapatan, pengeluaran, aset, kesempatan, atau akses layanan di antara kelompok penduduk atau wilayah.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output yang lebih besar atau lebih bernilai dari input yang digunakan.

Transformasi struktural

Perubahan komposisi ekonomi dari sektor dan pekerjaan berproduktivitas rendah menuju sektor dan pekerjaan berproduktivitas lebih tinggi.

Transisi hijau

Peralihan menuju pola ekonomi yang lebih rendah emisi, lebih efisien sumber daya, dan lebih berkelanjutan secara ekologis.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2024, November 15). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39.*

Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381.*

Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2025, May 5). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah.*

Badan Pusat Statistik. (2025, August 29). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Ekspor dan impor Indonesia Desember 2025 masing-masing tercatat USD 26,35 miliar dan USD 23,83 miliar.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.*

Bank Indonesia. (2025, February 20). *Neraca Pembayaran Indonesia triwulan IV 2024 surplus, ketahanan sektor eksternal terjaga.*

Bank Indonesia. (2026, January 6). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran.*

Bank Indonesia. (2026, January 22). *BI perkuat struktur industri sistem pembayaran untuk mewujudkan ekonomi digital yang andal.*

International Monetary Fund. (2026, January 19). *World Economic Outlook Update: Global economy—Steady amid divergent forces.*

International Monetary Fund. (2026, January 21). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia.*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026, January 9). *Bauran EBT di sektor listrik lampau target RUKN.*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025, May 26). *RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034.*

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, January 15). *Realisasi investasi 2025 lampau target, hilirisasi melompat 43,3 persen.*

Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025, May 2). *Siaran Pers Bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025.*

World Bank. (2025). *Indonesia Economic Prospects.*

World Bank. (2025). *Macro Poverty Outlook: Indonesia.*

*Rudy C Tarumingkeng: Indonesia di Tengah Globalisasi - Menata
Ekonomi Masa Depan yang Inklusif*

World Trade Organization. (2026, March). *Global Trade Outlook and
Statistics*.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 3 April
2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69cf50a0-7368-8398-bf14-cf63af1db4f9>